



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDPU PANJA KEBIJAKAN KURIKULUM
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022.
Masa Sidang ke-	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Dengan	: Pakar dan Praktisi Pendidikan.
Hari/Tanggal	: Senin, 11 April 2022.
Pukul	: 10.00 – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Iis Anisa/Kasubag Rapat Set. Komisi X DPR RI.
Agenda acara	: 1. Sinkronisasi Regulasi Kebijakan Kurikulum Darurat, Kurikulum Prototipe, dan Kurikulum Merdeka dengan Peraturan Perundangan Pendidikan. 2. Pandangan terhadap Kebijakan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran, dan Rencana Penerapan Kurikulum Merdeka.
Hadir Komisi X DPR RI	: 21 orang dari 30 orang anggota Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Ki Darmaningtyas (Pengamat Pendidikan). 2. Indra Charismiadji (Direktur Vox Populi Institute Indonesia). 3. Satriwan Salim, SPd. MSi. (Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru). 4. Gunawan Efendi, S.T.P., M.B.A. (Badan Koordinasi Pendidikan Budhist Indonesia).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 10.20 WIB oleh **Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM.** (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1)

dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR RI.

II. CATATAN/KESIMPULAN

A. Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada **Ki Darmaningtyas, Indra Charismiadi, Satriwan Salim, SPd. MSi.** dan **Gunawan Efendi, S.T.P., M.B.A.** atas paparan, masukan, dan saran mengenai Kebijakan Kurikulum (*bahan terlampir*), antara lain:

1. **Ki Darmaningtyas**, menyampaikan paparan antara lain:

- a. Kurikulum 2013 dikembangkan untuk menyiapkan generasi kompeten menghadapi abad ke-21, memiliki desain integratif yang diorganisasikan melalui Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, sehingga pengetahuan, keterampilan, dan sikap, saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
- b. Kurikulum Merdeka tidak terdapat kerangka berfikir tersendiri, namun meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi oleh kurikulum sebelumnya, dan hanya dapat dilaksanakan sebagai kurikulum opsional.
- c. Pada dasarnya, apapun kurikulum yang diterapkan, perlu diinterpretasi oleh guru dan dimodifikasi sesuai konteks, sehingga guru dapat mengajarkan persoalan yang dihadapi oleh murid di berbagai sekolah.
- d. Kurikulum Merdeka sulit diimplementasikan di sekolah reguler yang Sarprasnya terbatas, jumlah Rombel diatas 20 orang, mayoritas guru PPPK, honorer dan kesejahteraannya mengandalkan tunjang profesi.
- e. Kurikulum Merdeka hanya dapat dilaksanakan pada sekolah dengan jumlah murid terbatas, didukung sarana prasarana yang lengkap, dan didukung oleh kemampuan guru yang kompeten dan bersertifikasi.

2. **Indra Charismiadi**, menyampaikan paparan antara lain:

- a. Laporan Jurnal *Annual Research Digest 2017-2018* dan Laporan capaian kinerja aspek PISA (literasi, numerasi dan sains), menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia stagnan dan tidak siap dalam menghadapi perkembangan abad ke-21.
- b. Merekomendasikan kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan bidang pendidikan agar setiap kebijakan bidang pendidikan:
 - 1) bermuara pada konsep mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - 2) mengikuti rekomendasi OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dan rekomendasi lain dengan evaluasi berkala;
 - 3) dilaksanakan berdasarkan pada rencana yang matang dengan dukungan kajian akademis yang komprehensif dan uji publik yang bermakna;

- 4) tidak menambah tekanan pada kondisi ekonomi masyarakat;
 - 5) tidak mengulang kesalahan kebijakan sebelumnya yang menganggap bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi otomatis akan meningkatkan mutu pendidikan (komplasensi).
3. Dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, **Satriwan Salim SPd. MSi**, menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan bidang pendidikan agar:
- 1) memperbaiki pola pelatihan guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (belajar dari hambatan dalam implementasi Kurikulum 2013) sehingga betul-betul berkualitas;
 - 2) melibatkan semua unsur *stakeholders* kurikulum, mulai dari Puskurjar BSKAP Kemdikbudristek, Pelatih Ahli, Fasilitator/Pendamping, Asosiasi Guru Mata Pelajaran, Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, BAN S/M, LPTK, Guru, Orang tua, dan peserta didik;
 - 3) sosialisasi dan pelatihan (diseminasi) Kurikulum Merdeka, melibatkan *stakeholders* kurikulum, khususnya Asosiasi Guru Mata Pelajaran yang berbasis mata pelajaran, agar lebih efektif dan tepat sasaran;
 - 4) segera membuat regulasi tentang Standar Proses dan Standar Penilaian;
 - 5) membuat Naskah Akademik sebagai dasar akademis perubahan PPKn menjadi Pendidikan Pancasila;
 - 6) menyiapkan skema Sekolah Penggerak yang berkeadilan, non-diskriminatif, demokratis, dan inklusif sesuai prinsip penyelenggaraan pendidikan (Pasal 4 UU Sisdiknas);
 - 7) dilakukan penyederhanaan format Perangkat Pembelajaran bagi guru;
 - 8) mengalokasikan waktu yang cukup untuk proses implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional;
 - 9) ada jaminan bahwa struktur Kurikulum Merdeka tidak merugikan jam pelajaran guru, dan tidak berdampak terhadap Tunjangan Profesi Guru (TPG), termasuk guru sejarah;
 - 10) membuat kepastian komposisi mata pelajaran lintas minat dalam struktur Kurikulum Merdeka dengan jalur SNMPTN, sehingga secara penuh ada jaminan bahwa siswa Kelas XII SMA/SMK/MA tidak dirugikan;
 - 11) ada perbaikan kualitas isi, desain, dan keterbacaan Buku Teks Pelajaran (Buku Elektronik) sesuai dengan spirit dalam Kurikulum Merdeka;
 - 12) ada kepastian jaminan keamanan data pribadi (digital safety) Guru, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik dalam akun aplikasi pembelajaran Belajar.id (<https://www.belajar.id/>) yang wajib digunakan sekolah di seluruh Indonesia.
4. **Gunawan Efendi S.T.P., M.B.A.**, menyampaikan paparan antara lain:
- a. Perubahan Kurikulum-13, Kurikulum Darurat, dan menjadi Kurikulum Prototipe/Merdeka sudah sesuai dengan harapan karena setiap sekolah dapat menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan kondisi setempat

(Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar), sehingga berpeluang untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berkarakter Pancasila.

- b. Kurikulum Darurat, efektif meningkatkan pemulihan pembelajaran karena adaptif dan aplikatif untuk kondisi sekolah yang beragam, yang ditunjukkan melalui evaluasi internal terhadap Rapor Pendidikan yang terlihat dari asesmen literasi dan numerasi, dengan selisih +/- 30% lebih tinggi daripada yang masih menggunakan K-13 sadaran kemanusiaan melalui mata pelajaran humaniora dan ilmu sosial.
 - c. Penerapan kurikulum secara optional telah memberikan kesempatan kepada sekolah untuk beroperasi dengan baik dan leluasa, beradaptasi dan belajar, serta mengukur tingkat kesiapan menuju diterapkannya Kurikulum Merdeka pada tahun 2024.
 - d. Menyampaikan usulan dan masukan, sebagai berikut:
 - 1) Kemendikbudristek RI perlu membuat tolok ukur capaian (*milestone*) bagi setiap opsi, supaya sekolah bisa siap pada saat Kurikulum Merdeka berlaku.
 - 2) Sekolah yang memilih Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri (IKM Mandiri) diberikan pendampingan dan difasilitasi setara dengan sekolah penggerak, termasuk BOS Kinerja.
 - 3) Perlu diselaraskan/sinkronisasi proses ke jenjang berikutnya dengan karakteristik Kurikulum Merdeka, (misalnya dari SMA ke PTN bagaimana penyesuaiannya).
 - 4) Kemudahan bagi semua guru dan kepala sekolah untuk mengikuti Diklat Guru/Kepala Sekolah Penggerak.
 - 5) Mencari solusi yang tetap dan cepat untuk merubah *mindset* Kepala Daerah, Disdik, Korwil, Pengawas, Kepala Sekolah, dan guru, agar memiliki persepsi yang sama untuk bergerak.
- B.** Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Mendukung setiap usulan dan rekomendasi agar Kemendikbudristek RI membuat tolok ukur capaian bagi setiap opsi, termasuk penerapan kurikulum yang dapat dilaksanakan di semua satuan pendidikan.
 2. Kebijakan kurikulum harus memperhatikan keragaman kompetensi guru, potensi/kemampuan peserta didik, kesiapan sarana dan prasarana, dan kondisi sosiologis, geografis dan budaya Indonesia.
 3. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengkaji kembali kebijakan pelaksanaan kurikulum dengan memperhatikan kajian ilmiah yang komprehensif dan landasan hukum yang kuat.
- C.** Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan

dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Kebijakan Kurikulum Komisi X
DPR RI kepada Pemerintah.

I. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.15 WIB

KETUA RAPAT,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM.', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM. *tf*